



Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar dari Perspektif Manajemen Pendidikan: Analisis Sistem Pemerintahan Terpadu

Kurniasih¹, Lely Endah Rini², Eriza Syahputra³, Sumitro⁴
^{1,2,3,4} Universitas Labuhanbatu, Indonesia

Correspondence Email: kurniasih290610@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan *Merdeka Belajar* merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan otonomi lembaga pendidikan, fleksibilitas kurikulum, dan penekanan pada capaian kompetensi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* dari perspektif manajemen pendidikan dalam kerangka sistem pemerintahan terpadu (*Integrated Government System*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Merdeka Belajar* sejalan dengan prinsip manajemen pendidikan modern yang menekankan desentralisasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan masih muncul dalam aspek koordinasi antarlembaga pemerintah, sinkronisasi regulasi, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung tata kelola kebijakan pendidikan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Manajemen Pendidikan, Merdeka Belajar, Sistem Pemerintahan Terpadu, SPBE.*

ABSTRACT

The Merdeka Belajar policy is one of the government's strategic programs aimed at improving the quality of national education by strengthening the autonomy of educational institutions, providing curriculum flexibility, and emphasizing student competency achievement. This study aims to evaluate the implementation of the Merdeka Belajar policy from the perspective of educational management within an integrated government system. This study uses a qualitative approach, employing literature review and public policy analysis. The results indicate that the Merdeka Belajar policy aligns with modern educational management principles that emphasize decentralization, efficiency, and accountability. However, challenges remain in the areas of coordination between government institutions, regulatory synchronization, and the readiness of human resources and digital infrastructure. The implications of this research demonstrate the importance of integrating electronic-based government systems (SPBE) in supporting effective, transparent, and adaptive education policy governance.

Keywords: Public Policy, Education Management, Independent Learning, Integrated Governance System, SPBE.

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan nasional merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di era globalisasi. Dunia saat ini ditandai oleh percepatan arus informasi, revolusi industri 4.0, dan disrupsi digital yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan penentu daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan *Merdeka Belajar* pada tahun 2019. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk inovasi sistemik terhadap paradigma pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung sentralistik, birokratis, dan kurang adaptif terhadap kebutuhan zaman. *Merdeka Belajar* mengusung semangat pembebasan dalam proses belajar, baik bagi peserta didik, guru, maupun lembaga pendidikan, dengan tujuan utama menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel, relevan, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi.

Secara konseptual, kebijakan *Merdeka Belajar* berlandaskan pada prinsip desentralisasi pendidikan dan otonomi satuan pendidikan. Hal ini berarti lembaga pendidikan diberikan ruang yang lebih luas untuk mengelola kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi secara mandiri sesuai dengan karakteristik serta potensi daerah masing-masing. Dalam kerangka manajemen pendidikan, kebijakan ini merefleksikan pendekatan *school-based management* yang menekankan partisipasi aktif kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Namun demikian, implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem ini, pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, efektivitas kebijakan nasional seperti *Merdeka Belajar* sangat bergantung pada kemampuan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas level pemerintahan.

Kondisi ini sering kali menimbulkan persoalan kesenjangan implementasi antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah maupun sekolah. Beberapa daerah memiliki kapasitas manajerial dan sumber daya yang memadai, sementara daerah lain masih terbatas dari sisi infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, maupun dukungan teknologi. Hal ini menyebabkan disparitas mutu pendidikan serta perbedaan dalam kecepatan dan kualitas implementasi kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah menginisiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks kebijakan pendidikan, SPBE diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung terwujudnya sistem pemerintahan terpadu (*integrated governance*) yang memungkinkan integrasi data, penyelarasan kebijakan, dan efisiensi koordinasi antarinstansi pemerintah.

Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan *Merdeka Belajar* dari perspektif manajemen pendidikan dan sistem pemerintahan terpadu menjadi sangat relevan. Dari sisi manajemen pendidikan, evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diimplementasikan secara efektif. Sementara dari sisi sistem pemerintahan terpadu, analisis ini berguna untuk memahami keterpaduan mekanisme birokrasi, efektivitas koordinasi antarlevel pemerintahan, serta peran digitalisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik di sektor pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* dengan menyoroti hubungan antara efektivitas manajemen pendidikan dan integrasi sistem pemerintahan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dapat memperkuat keberhasilan pelaksanaan *Merdeka Belajar*, meningkatkan efisiensi birokrasi pendidikan, serta memastikan kesetaraan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan studi literatur (*library research*) (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan *Merdeka Belajar* dari perspektif manajemen pendidikan serta integrasinya dengan sistem pemerintahan terpadu (*integrated governance*). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, kebijakan, dan konteks sosial secara holistik berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang kredibel.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya. Data sekunder digunakan untuk menggali informasi yang telah terdokumentasi dan relevan dengan topik penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan meliputi:

Dokumen kebijakan dan peraturan pemerintah, seperti: (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Merdeka Belajar, (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, (4) Dokumen strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), (5) Laporan implementasi kebijakan, termasuk laporan tahunan dan evaluasi program *Merdeka Belajar* yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, Bappenas, dan lembaga penelitian pendidikan nasional, (6) Artikel ilmiah nasional dan internasional, baik yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (SINTA, Scopus) maupun prosiding akademik, yang membahas tema kebijakan pendidikan, manajemen publik, dan pemerintahan digital, dan (7) *Literatur teoretis* berupa buku, hasil penelitian terdahulu, dan kajian konseptual mengenai teori manajemen pendidikan, kebijakan publik, serta sistem pemerintahan terpadu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap: *pertama*, identifikasi dan seleksi literatur: Peneliti menelusuri berbagai sumber ilmiah dengan menggunakan kata kunci seperti *Merdeka Belajar*, manajemen pendidika, *governance*,

SPBE, dan *educational policy analysis* melalui database seperti Google Scholar, DOAJ, dan SINTA. *Kedua*, klasifikasi data: Setiap sumber dikategorikan berdasarkan jenisnya (kebijakan, laporan, atau hasil penelitian) serta relevansinya terhadap fokus penelitian. *Ketiga*, reduksi data: Informasi yang bersifat duplikatif atau tidak relevan dieliminasi, sementara data yang mendukung analisis substansial dipertahankan. *Keempat*, koding tematik: Data yang terkumpul kemudian diberi kode berdasarkan tema analisis, seperti aspek manajemen pendidikan, koordinasi pemerintahan, dan penerapan SPBE.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan *analisis isi (content analysis)* dan *analisis kebijakan (policy analysis)* yang mencakup tiga tahap utama: *pertama*, Tahap Analisis Kebijakan (Policy Analysis). Pada tahap ini, dilakukan penelaahan terhadap tujuan, arah, dan strategi kebijakan *Merdeka Belajar* dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Analisis diarahkan pada kesesuaian antara tujuan kebijakan, landasan hukum, serta pelaksanaannya di lapangan.

Kedua, Tahap Evaluasi Manajemen Pendidikan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan empat fungsi utama manajemen pendidikan, yaitu: (a) Perencanaan (*Planning*): bagaimana kebijakan *Merdeka Belajar* dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan nasional. (b) Pengorganisasian (*Organizing*): pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan. (c) Pelaksanaan (*Actuating*): bentuk implementasi program *Merdeka Belajar* di berbagai satuan pendidikan. (d) Pengawasan (*Controlling*): mekanisme evaluasi, pelaporan, dan akuntabilitas kebijakan.

Ketiga, Tahap Analisis Sistem Pemerintahan Terpadu (*Integrated Governance Analysis*). Pada tahap ini, penelitian menilai sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan terpadu terwujud melalui penerapan SPBE dalam mendukung efektivitas kebijakan pendidikan. Analisis ini mencakup: (a) Integrasi data dan informasi antarinstansi pemerintah, (b) Efisiensi koordinasi birokrasi pusat dan daerah, dan (c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Hasil dari ketiga tahap analisis ini kemudian disintesis untuk membentuk gambaran menyeluruh tentang hubungan antara efektivitas manajemen pendidikan dan tata kelola pemerintahan terpadu dalam pelaksanaan *Merdeka Belajar*.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan proses *triangulasi sumber dan teori*. *Triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai jenis dokumen (kebijakan, laporan, dan literatur akademik) untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, *triangulasi teori* dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis, seperti teori manajemen pendidikan (Mulyasa, 2021), teori kebijakan publik (Dunn, 2018), dan teori pemerintahan digital (OECD, 2020), untuk memperkuat interpretasi hasil analisis.

Selain itu, proses validasi konseptual dilakukan melalui pembacaan mendalam (*critical reading*) dan interpretasi kualitatif secara sistematis agar hasil penelitian memiliki dasar argumentatif yang kuat dan sesuai dengan standar akademik ilmiah.

Kerangka Analisis

Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama analisis, yaitu: (1) Dimensi Kebijakan Pendidikan, yang menelaah arah dan tujuan kebijakan Merdeka Belajar. (2) Dimensi Manajemen Pendidikan, yang menilai efektivitas implementasi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. (3) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Terpadu, yang mengevaluasi peran SPBE dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar dalam Konteks Manajemen Pendidikan

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan tonggak perubahan paradigma pendidikan nasional yang menempatkan kemandirian lembaga pendidikan sebagai pusat pengambilan keputusan manajerial. Prinsip dasar kebijakan ini berorientasi pada desentralisasi manajemen pendidikan, pemberdayaan sumber daya sekolah, dan penguatan kapasitas tenaga pendidik.

Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan prinsip manajemen pendidikan modern yang mencakup empat fungsi utama: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam konteks *Merdeka Belajar*, keempat fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam empat prinsip kebijakan utama:

1. Otonomi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Desentralisasi manajerial memberi ruang bagi sekolah untuk mengembangkan inovasi kurikulum dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Otonomi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada instruksi birokratis pemerintah pusat serta memperkuat inisiatif sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa kapasitas manajerial kepala sekolah dan guru masih menjadi tantangan utama. Sebagian lembaga pendidikan belum sepenuhnya siap mengelola otonomi dengan baik karena keterbatasan sumber daya, budaya organisasi yang kaku, serta minimnya pelatihan manajerial (Mulyasa, 2021).

2. Kurikulum Fleksibel dan Adaptif

Kurikulum dalam kebijakan *Merdeka Belajar* dirancang lebih terbuka, memberi keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan konteks lokal serta kebutuhan peserta didik. Prinsip ini memperkuat relevansi pendidikan terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, fleksibilitas kurikulum juga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari pendidik. Di sejumlah daerah, guru masih menghadapi kendala dalam memahami konsep kurikulum diferensiatif serta kesulitan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kompetensi.

3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Merdeka Belajar menempatkan guru sebagai aktor utama transformasi pendidikan. Program *Guru Penggerak*, *Platform Merdeka Mengajar*, dan pelatihan daring menjadi bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Meskipun demikian, pemerataan akses pelatihan dan disparitas kualitas antarwilayah masih menjadi tantangan.

4. Evaluasi Berbasis Capaian Kompetensi

Kebijakan ini menekankan evaluasi pendidikan yang menilai kemampuan nyata siswa, bukan sekadar hasil ujian standar. Pendekatan ini sejalan dengan manajemen berbasis hasil (*results-based management*). Namun, penerapannya masih menghadapi kendala pada aspek asesmen digital, kesiapan guru dalam merancang instrumen penilaian autentik, serta integrasi data hasil belajar di tingkat nasional.

Dari perspektif manajemen pendidikan, kebijakan *Merdeka Belajar* telah mendorong terciptanya budaya inovatif dan kolaboratif di satuan pendidikan. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya variasi hasil implementasi antarwilayah. Sekolah dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, infrastruktur digital yang memadai, serta kepala sekolah yang visioner cenderung lebih berhasil menerapkan prinsip *Merdeka Belajar* dibanding daerah dengan kapasitas manajerial dan fasilitas yang terbatas.

Peran Sistem Pemerintahan Terpadu (SPBE) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan *Merdeka Belajar* tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistik. Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting sebagai instrumen untuk mewujudkan integrasi data, efektivitas komunikasi, dan efisiensi koordinasi antarlembaga pemerintah.

SPBE yang diatur melalui *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018* bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Dalam konteks kebijakan pendidikan, SPBE menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah melalui digitalisasi proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Fungsi SPBE dalam Tata Kelola Pendidikan

SPBE memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung *Merdeka Belajar*: (1) Integrasi Data Pendidikan. Dengan platform seperti *Dapodik*, *Siaran Pendidikan Digital*, dan *Rapor Pendidikan Nasional*, SPBE memungkinkan konsolidasi data peserta didik, guru, sarana prasarana, serta capaian pembelajaran di seluruh Indonesia. (2) Efisiensi Proses Birokrasi. Digitalisasi proses pelaporan dan akreditasi mempercepat aliran informasi dari sekolah ke pemerintah daerah dan pusat, sehingga meminimalkan tumpang tindih administrasi. (3) Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan. SPBE menyediakan mekanisme pengawasan digital yang memungkinkan publik mengakses informasi terkait kebijakan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan.

Tantangan Implementasi SPBE

Meskipun potensinya besar, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah kendala utama: (1) Belum optimalnya integrasi data antara pusat dan daerah. Banyak daerah belum memiliki sistem informasi pendidikan yang kompatibel dengan platform nasional. (2) Kurangnya interoperabilitas sistem. Data dari berbagai instansi seperti Kemendikbudristek, Kemenag, dan Dinas Pendidikan daerah sering kali tidak saling terhubung. (3) Rendahnya literasi digital aparatur pendidikan. Pegawai di tingkat daerah masih membutuhkan pelatihan intensif untuk mengoperasikan sistem berbasis digital secara efektif.

Dalam perspektif *governance*, SPBE sesungguhnya dapat menjadi fondasi penting untuk memperkuat prinsip *akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi* kebijakan publik. Namun, realisasi prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, dukungan infrastruktur teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia di semua level pemerintahan.

Analisis Efektivitas Kebijakan Merdeka Belajar dalam Sistem Pemerintahan Terpadu

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis kebijakan, efektivitas pelaksanaan *Merdeka Belajar* dalam kerangka sistem pemerintahan terpadu dapat dikategorikan menjadi tiga tingkat keberhasilan:

Efektivitas Tinggi pada Inovasi Kurikulum dan Fleksibilitas Belajar

Program seperti *Kurikulum Merdeka* dan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran di sekolah. Guru dan siswa lebih leluasa dalam mengeksplorasi metode pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan kreativitas.

Efektivitas Moderat dalam Penguatan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah

Melalui *Program Guru Penggerak* dan *Sekolah Penggerak*, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan mengalami kemajuan. Namun, pelaksanaan program ini belum merata di seluruh daerah karena keterbatasan anggaran dan disparitas infrastruktur digital.

Efektivitas Rendah dalam Sinkronisasi Sistem Pemerintahan dan Manajemen Lintas Sektor

Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah masih menghadapi hambatan struktural. Tumpang tindih regulasi, kurangnya integrasi data, serta lemahnya komunikasi antarlembaga menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Kesenjangan efektivitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Merdeka Belajar* tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh tingkat keterpaduan sistem pemerintahan (*integrated government system*). Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas sektor melalui mekanisme *one-data policy*, memperluas jangkauan SPBE di daerah, serta membangun kapasitas digital aparatur pendidikan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Dari perspektif teori manajemen pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Integrasi sistem informasi, penyelarasan visi antarinstansi, dan kolaborasi strategis antarlevel pemerintahan merupakan prasyarat untuk mewujudkan efektivitas kebijakan *Merdeka Belajar* secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kebijakan *Merdeka Belajar* merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan transformasi sistem pendidikan nasional menuju model pembelajaran yang lebih otonom, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi peserta didik. Dari perspektif manajemen pendidikan, kebijakan ini telah selaras dengan prinsip-prinsip modern seperti desentralisasi, efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penerapannya mendorong satuan pendidikan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, memperkuat profesionalisme guru, dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *Merdeka Belajar* masih beragam di berbagai daerah. Perbedaan kapasitas manajerial lembaga pendidikan, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sekolah-sekolah dengan kepemimpinan visioner dan dukungan teknologi yang memadai cenderung lebih berhasil dalam menginternalisasi semangat *Merdeka Belajar*, sedangkan lembaga di daerah dengan keterbatasan infrastruktur menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

Dalam kerangka sistem pemerintahan terpadu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbukti memiliki potensi signifikan dalam memperkuat koordinasi, transparansi, dan efisiensi kebijakan pendidikan. SPBE berperan sebagai fondasi digital untuk integrasi data, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya interoperabilitas antarinstansi, kesenjangan literasi digital aparatur pendidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan data lintas lembaga.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan *Merdeka Belajar* sangat ditentukan oleh tingkat keterpaduan sistem pemerintahan dan efektivitas manajemen pendidikan di setiap level pelaksanaannya. Untuk itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan: (1) Pemerintah perlu memperkuat integrasi data dan kolaborasi lintas sektor melalui kebijakan *one-data policy* di bidang pendidikan. (2) Kapasitas manajerial kepala sekolah, guru, dan aparatur daerah perlu ditingkatkan agar mampu mengelola otonomi pendidikan secara profesional dan berorientasi hasil. (3) Pengembangan dan perluasan infrastruktur digital pendidikan harus menjadi prioritas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi. (4) Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar implementasi *Merdeka Belajar* tetap adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Dengan demikian, integrasi antara manajemen pendidikan yang efektif dan sistem pemerintahan terpadu menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, M., Assingkily, M. S., & Prastowo, A. (2020). Kebijakan Internal Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 11(1), 52-67.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Danim, S. (2011). *Manajemen Pendidikan: Teori, Konsep, dan Prinsip*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2016). *Manajemen Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD. (2020). *Education Policy Outlook: Indonesia*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/education-policy-outlook-indonesia-2020-en>
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2018). *Total Quality Management dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Andi.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wijayanti, D., & Putra, A. M. (2022). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Manajemen Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 12(3), 145–160. <https://doi.org/10.21009/jmpi.123.145>.
- Yuliani, N., & Arifin, M. (2021). Digital Governance dan Transformasi Pendidikan di Indonesia: Analisis SPBE pada Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(2), 101–117. <https://doi.org/10.25077/japk.8.2.101-117.2021> or <https://doi.org/10.25077/japk.8.2.101-117.2021>